**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa, selain itu pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, agar kesadaran dan kepedulian itu tumbuh perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya menyetor pajak ke negara serta melakukan sosialisasi pembinaan kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap apa pentingnya pajak, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan wujud dari pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional, selain itu diperlukan perubahan dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih baik kepada Wajib Pajak maka dibuatlah sistem administrasi perpajakan modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak mengenai perencanaan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional

Menurut Rahman ( 2013 ) konsep modernisasi pajak adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance, tujuannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan sehingga penerimaan pun bisa meningkat, serta produktivitas pegawai pajak tinggi.

 Selain itu juga menurut Anggraini ( 2012 ) Modernisasi yang dibuat DJP saat ini yaitu menjalankan program baru yaitu e-SPT. E-SPT merupakan aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang akan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewaijban perpajakannya sehingga kemauan membayar pajak akan meningkat serta berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak.

Jadi bisa disimpulkan, Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini merupakan salah satu rencana utama dalam kebijakan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem baru yang diterapkan akan terdapat beberapa perubahan, diantaranya adalah struktur organisasi dan pelayanan. Perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang dapat memonitor proses pelayanan sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas. Program modernisasi ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama yaitu optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan melalui pemberian pelayanan yang prima dan penegakan hukum yang konsisten, efisiensi administrasi dalam penerapan sistem dan yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Untuk memperoleh *e*-SPT, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak, bagi Wajib Pajak besar dapat menghubungi *Account Representative* yang telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Jumaili ( 2011 ) melaui blog pribadinya mengatakan bahwa Fenomena yang terjadi dalam implementasi *e*-SPT ditunjukkan pada pendapat Wajib Pajak melalui blognya yaitu beberapa pendapat Wajib Pajak sebagai pengguna *e*-SPT memaparkan bahwa secara umum *e*-SPT tidak menyulitkan bahkan sedikit mempermudah pelaporan pajak. Namun, *e*-SPT merupakan barang yang relatif masih baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengenalan lebih mendalam dan yang terpenting adalah puaskah Wajib Pajak atas modernisasi pajak tersebut.

Menurut Rahman ( 2013 ) survei yang dilakukan AC Nielsen , sebuah lembaga survei internasional yang independen, merilis hasilnya bahwa indeks kepuasan Wajib Pajak ( eQ Index ) adalah 81. Artinya, makin tinggi indeksnya makin baik dan berada diatas pelayanan umum instansi pemerintah lainnya indonesia mendapatkan indeks 75 .

Sehubungan dengan penerapan sistem aplikasi modern yang telah diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan pajak, salah satunya yaitu dengan adanya *e*-SPT yang dapat Wajib Pajak *download* pada komputernya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh masalah ini dan penulis hanya akan membahas mengenai pelaksanaan *e*-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Analisis Penerapan E-SPT Bagi Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang”**.

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Penerapan e-SPT bagi wajib pajak ?

2. Bagaimana Pengaruhnya penerapan e-SPT terhadap penerimaan pajak ?

**1.3 Ruang Lingkung Pembahasan**

Membatasi pembahasan dari permasalahan kedalam satu ruang lingkup sangat penting. Hal ini ditunjukan agar dalam pembahasan permasalahan ini dapat lebih terfokus dan terarah sehingga dapat diambil alternatif pemecahan yang baik. Dengan demikian pembahasan dibatasi pada penerapan e-SPT menurut Wajib Pajak dan Pengaruh jumlah pengguna e-SPT terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2008 - 2013.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

**1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Menganalisis penerapan e-SPT pada KPP Madya Palembang menurut Wajib Pajak.
2. Menganalisis pengaruh jumlah pengguna e-SPT terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang.

**1.4.2 Manfaat Penulisan**

 Manfaat yang diharapkan dengan adanya penulisan ini yaitu:

1. Menambah pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis sendiri, wajib pajak dan KPP Madya Palembang.
2. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta titik tolak bagi penelitian selanjutnya.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis mengemukakan dasar dan arah permasalahan yang akan dianalisis, yaitu latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini,penulis mengemukakan pendapat para ahli mengenai teori-teori tentang Pajak, Wajib Pajak, kepatuhan wajib pajak, ketepatan pembayaran pajak, pemeriksaan pajak serta penagihan pajak. Teori-teori yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini meliputi pengertian wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pengertian pengawasan pemeriksaan dan penagihan pajak, tujuan pengawasan dan pemeriksaan pajak, undang-undang yang mengatur tentang kepatuhan, pemeriksaan serta penagihan pajak.

**BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan metodelogi penelitian apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu metode analisis deskriptif, uji normalitas dan uji parsial.

**BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis menguraikan pembahasan dan analisis data berdasarkan informasi perusahaan .

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dari laporan akhir ini.Pada bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV. Pada bab ini penulis memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi perusahaan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.